

GERAKAN BAHDIY DI TANJALAR
1850 - 1865



SKRIPSI

Diajukan Untuk Menenuhi Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra
Pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin

Oleh
Ibrahim Salim
F 81 98 018

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin
Makassar
2002

Hasanuddin
KAAN
R.B02

L



SEPAKEM BUKU DI TANALAR
1880 - 1865



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra
Pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin

Oleh
Ibrahim Salim
F 81 98 018

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin
Makassar
2002

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	15/9 02
Asal Dari	Sastra
Banyaknya	2 (dua)
Harga	-
No. Inventaris	030715-074
lok. Klas	

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin :

Nomor : 940/ J04.11.1/ PP.27/ 2002

Tanggal : 23 Mei 2002

Dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Makassar, September 2002

Konsultan I



Drs. Daud Limbugau, S.U

Konsultan II



Dr. Edward L. Poelnggomang

Disetujui untuk diteruskan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Dekan,
U.b. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah



Dr. Edward L. Poelnggomang

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA**

Pada hari ini, Rabu 12 Desember 2002 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul :

**GERAKAN BANDIT DI TAKALAR
1950 – 1965**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Sastra Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

MAKASSAR, 12 Desember 2002

Panitia Ujian Skripsi :

- | | | |
|---|--------------|---------|
| 1. Prof. Dra. Ny. Marrang Paranoan, MS. | Ketua | (.....) |
| 2. Dra. Diah Kusmarini, M.Hum. | Sekretaris | (.....) |
| 3. Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dra. Margriet Lappia Moka, MS. | Penguji II | (.....) |
| 5. Drs. Daud Limbugau, SU. | Konsultan I | (.....) |
| 6. Dr. Edward L. Poelinggomang. | Konsultan II | (.....) |

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan suatu karya ilmiah bagi seorang mahasiswa tingkat akhir program strata satu (S.I) yang merupakan salahsatu bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat gelar keserjanaan pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Persyaratan ini bukanlah suatu hal mudah karena standar ilmiah menuntut berbagai keterampilan dan kemampuan yang tinggi dan di dukung oleh peralatan akademik yang sekurang-kurangnya cukup jika tidak baik atau memuaskan. Penulis menyadari bahwa keterampilan dan kemampuan masih belum memadai untuk menyusun suatu karay ilmiah yang standar.

Meskipun demikian, berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis memberanikan diri untuk meneliti dan mengungkapkan obyek studi ini dalam bentuk karya tulis berdasarkan criteria akademik untuk memenuhi persyaratan karya ilmiah bagi penyelesaian studi program Strata Satu (S.I). objek penulisan yang penulis sajikan pada dasarnya belum lengkap dan sempurna. Hal itu berhubungan dengan sumber data dan keterangan yang tersedia yang dapat dikumpulkan dan digunakan dalam penyusunan karya ini. Namun demikian diharapkan dalam penulisan karya ilmiah ini dapat berguna

dan bermanfaat menyumbangkan pengalaman masa lampau dalam pembenahan diri dan pedoman dalam dalam menggali kehidupan yang sejarah dalam ruang dan waktu.

Penulis sadari dan yakin sepenuhnya bahwa keberhasilan penulis untuk menyelesaikan karya ini berkat ketulusan dan keikhlasan bapak Dr. Edward L. Poelinggomang dan Bapak Drs. Daud Limbugau, S.U yang telah meluangkan waktunya membimbing dalam penelitian dan penulisan karya ini. Disamping itu pula penulis mengucapkan pula terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

Bapak Dekan Fakultas Sastra Univeritas Hasanudddin beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan yang semaksimal mungkin selama penulis menempah ilmu di perguruan tinggi pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin.

Bapak Dr. Edward L. Poelinggomang dan Bapak Drs. Daud Limbugau, S.U selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sejarah dan Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sejarah yang telah banyak melayani dan membimbing dalam penyelesaian studi dalam bidang Ilmu Sejarah, khususnya kanda Sahajuddin dan kanda Syahrul.

Semua teman yang telah bersedia membantu dan memberikan dorongan (Qia, Lia, Checheng, Aty, edy, Padly) dan sebagai tempat diskusi

dalam membahas apa yang penulis tulis (Miro, Checep, Petrik) dan buat seseorang yang mendampingi penulis dalam pembuatan karya tulis, selain ucapan terima kasih hanya cinta tulus dan karya inilah yang dapat kupersembahkan untukmu.

Akhirnya kepada Ayah dan Ibu tercinta, penulis haturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas pemeliharaan, bimbingan, dan dorongan yang penuh keiklasan dan tanggung jawab, yang mengantar penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hingga pada penyelesaian karya ilmiah ini guna mengakhiri pendidikan pada perguruan tinggi. Juga kepada adikku yang tersayang (**Yayu**), beserta keluarga lainnya yang telah memberikan hingga menyelesaikan karya ini, dihaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, semoga Allah Subuhana WataAla senantiasa melimpahkan rahmatnya dan hidayatnya kepada kita semuanya, Amin.

Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Metodologi.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	11
BAB II. PROFIL WILAYAH DAERAH TAKALAR	15
A. Geographi Dan Demographi.....	15
B. Kehidupan Sosial Budaya Dan Politik	20
C. Ikhtisar Kesejarahan Daerah Takalar	23
BAB III. GERAKAN BANDIT DI DAEARAH TAKALAR	26
A. Terjadinya Perbanditan.....	29
B. Pengorganisasian Gerakan.....	36
C. Keresahan Yang Ditimbulkan.....	38
D. Penumpasan Gerakan.....	40
BAB IV. PENGARUH TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT	42
A. Daerah Takalar Sebelum Penumpasan	42
a. Situasi Politik	46
b. Keadaan Ekonomi	47
c. Sosial Budaya.....	48
B. Reaksi Dan Aktifitas Masyarakat.....	49
a. Mencari Bentuk Dan Identitas Diri	49
b. Dampak Yang Ditimbulkan.....	50
C. Menata Kehidupan Masyarakat Takalar	52
a. Menata Siatem Politik Dan Pemerintahan	52
b. Mengembangkan Pertanian Dan Infrastruktur	53
BAB V. PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya Gerakan Bandit di Takalar tahun 1950 – 1965, selain itu pula memberikan gambaran mengenai kondisi Kabupaten Takalar di tengah-tengah adanya gejolak pemberontakan DI/TII.

Adapun tujuan dari penulisan " Gerakan Bandit Di Takalar Tahun 1950-1965 " adalah memberikan gambaran mengenai Gerakan Bandit yang ada di Kabupaten Takalar sebagai Gerombolan pengacau yang meresahkan masyarakat. Selain dari itu memberikan perbandingan gerakan bandit yang terjadi pada masa tahun 1950 – 1965 dengan keadaan sekarang.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi Arsip. Adapun bahan-bahan yang dikaji adalah tulisan-tulisan yang relevan dengan judul seperti skripsi yang ditulis oleh Marwani Muchtar yang berjudul Banditisme dalam Perjuangan I Tolo Dang Magassing, serta bahan-bahan yang terdapat di arsip yang berhubungan dengan daerah Kabupaten Takalar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan peristiwa merupakan obyek pangkal penelitian dalam penulisan sejarah, oleh karena itu yang diperhatikan dalam penulisan sejarah adalah menyangkut tindakan dan perilaku manusia yang dijadikan sebagai cerita sejarah. Suatu peristiwa sejarah yang bersifat kemanusiaan dapat dilihat dan ditentukan berdasarkan sudut persoalannya¹, maka penulis mencoba menelusuri dan mengungkapkan sebuah permasalahan perbanditan di Daerah Takalar tahun 1950-1965.

Pengertian bandit secara umum adalah seseorang atau lebih yang melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain dengan jalan mengambil barang atau harta benda tanpa sepengetahuan pemiliknya yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan kadang orang susah mengetahui siapa-siapa yang tergolong kedalam kelompok bandit tersebut.

Sehubungan dengan itu penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan dan menjelaskan gerakan perbanditan yang terjadi di

¹ Hugiona dan P.K.Poerwanta. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT.Panelan Cipta 1992) hal 3

kabupaten Takalar pada tahun 1950 - 1965 . Mengingat situasi dan kondisi di kabupaten Takalar pada tahun 1950 – 1965 yang dipengaruhi oleh gejala-gejala seperti gerakan pemberontakan DI/TII. Apalagi dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang baru dicapai, banyak sekali hal-hal yang terjadi disertai dengan adanya pergolakan mengakibatkan keresahan masyarakat membuat kehidupan semakin tidak menentu.

Pengaruh krisis ekonomi serta kelaparan yang menyebabkan kemiskinan dan kesejahteraan penduduk bumiputera sangat buruk pada masa pendudukan kolonial Hindia Belanda, sebab pada akhir penjajahan di Sulawesi Selatan hanya meninggalkan kebodohan dan kemiskinan² demikian juga halnya dengan daerah Takalar .

Istilah bandit sosial ini perlu juga mendapat kejelasan, guna memperoleh gambaran yang sejalan dengan sumber atau kasus-kasus yang terjadi di daerah Takalar . Menurut Erich J.Hobsbawn ada tiga bentuk bandit sosial yakni : pertama perampok terhormat; kedua kelompok-kelompok gerilya, pejuang yang primitif (kaum Haiduk) ; ketiga pembalas dendam yang membawa teror.³

² Daud Limbugau, "Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20". Dalam buku: Muklis Paeni, *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai*, (Ujung Pandang: p3mp UNHAS, 1989). hal. 84

³ Erick J. Hobsbawn, *Bandit-Bandi Sosial*, Jakarta Teplos Pres Cet 1, Oktober 2000, hal. 11

yang terjadi pada tahun 1950 – 1965, sebab gerakan bandit pada saat itu bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan banyak hal yang mempengaruhi. Perbanditan yang terjadi di kabupaten Takalar pada tahun 1950 – 1965 relevan dengan apa yang digambarkan Hobsbawn, karena tindakan atau gerakan yang mereka lakukan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan kelompok. Bahkan ada yang melakukan perampokan hanya merupakan kebiasaan, tindakan yang membedakan dengan gerakan yang dilakukan oleh I Tolo Daeng Magassing. Mereka merampok harta benda dari anggota masyarakat yang menjadi pegawai pemerintahan Hindia-Belanda serta bangsawan-bangsawan yang mendukung pemerintah Hindia Belanda. Bahkan ada kegiatan dilakukan bermotif alasan politik dan memperlihatkan kekuasaannya. Untuk lebih mempermudah dalam penulisan, maka penulis akan membatasi permasalahan dengan mengkaji tentang perbanditan yang terjadi di Takalar.

Alasan penulis memilih tahun 1950 –1965 sebagai batasan temporal dalam permasalahan ini karena, banyak sekali hal-hal yang terjadi di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Takalar baik masalah-masalah ekonomi, sosial dan politik yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Apalagi dengan adanya pemberontakan Kahar Muzakkar ini sangat terasa dalam

kehidupan masyarakat menjadi tidak menentu, yang menurut penulis memungkinkan munculnya gerakan bandit (perbanditan).

Kejadian itu berlangsung ditengah-tengah kekacauan politik ekonomi nasional⁴ dan kondisi politik Sulawesi Selatan sangat buruk, sebagai akibat dari pemberontakan DI/TII maupun gerakan bandit itu sendiri. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dari tahun 1950-1965 cukup panjang dalam situasi perubahan sistem pemerintahan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1945. Menurut M.C.Recklefs, Negara Republik Indonesia pada periode 1950-1957 dapat dikatakan baru dalam tatanan percobaan demokrasi yang gagal⁵, di samping juga terjadinya pertentangan dalam tubuh militer, antara reguler dan non reguler serta integrasi gerilya dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI)⁶. Khususnya di daerah Takalar adanya tuntutan dari Laskar Lipang Bajeng dan Brigade Je'nepono untuk bergabung kedalam TNI yang hasilnya dibentuk batalyon 721 yang dipercayakan kepada Makkatang Daeng Sibali sebagai komandan yang merupakan adik dari Ranggong Daeng Romo⁷

⁴ Untuk memahami politik ekonomi antara tahun 1949 sampai 1957, baca: Richard Robinson, *Indonesia The Rise of Capital*, (Australia: Asian Studies Association of Australia, 1986), hal. 36-37

⁵ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991), hal. 355

⁶ Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar : Dari Tradisi Ke Pemberontakan DI/TII*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1989), hal 343

⁷ *Ibid*, hal. 370



Pemberontakan Kahar Muzakkar membuat situasi dan kondisi suhu politik di Sulawesi Selatan khususnya Takalar dalam keadaan yang tidak pasti, kerusuhan itu dapat dirasakan di seluruh pelosok desa-desa di Sulawesi Selatan, demikian pula dengan daerah Turatea dan sekitarnya merasakan hal yang sama.

Selain hal-hal tersebut di atas, yang mendorong penulis memilih "Perbanditan di Daerah Turatea pada tahun 1950-1965" sebagai tema, karena ada hal yang penulis anggap penting yaitu sejarah perbanditan di Sulawesi Selatan masih kurang mendapat perhatian dan menjadikan daerah Takalar sebagai obyek penulisan tentang gerakan bandit sosial di Sulawesi Selatan yang hanya dapat digambarkan seperti karya Marwani Muchtar tentang "Banditisme dalam perjuangan" (gerakan I Tolo Daeng Magassing)⁸. Tulisannya ini menggambarkan tentang perjuangan I Tolo Dg Magassing dalam melawan pemerintah Hindia Belanda dengan jalan melakukan perampokan.

Gerakan bandit sosial ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari anggota Lipang Bajeng yang memisahkan diri dan masuk ke hutan di bawah pimpinan Syamsuddin Daeng

⁸ Marwani Muchtar, *Banditisme Dalam perjuangan: (Gerakan I Tolo Dg Magassing)*, Makassar. Skripsi S.I Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1990, X + 82 halaman.

Ngerang dan Qaeruddin Muang yang nantinya bergabung ke dalam DI/TII.⁹ Selain hal tersebut di atas yang mempengaruhi, penulis juga melihat keterlibatan para bangsawan dan para petinggi di daerah Turatea, seperti pembentukan Laskar Pemberontakan rakyat Indonesia Sulawesi yang di dalamnya tergabung para bangsawan yakni Karaeng Polombangkeng H. Padjonga Dg Ngalle, H.M Kareang Djarum, Ranggong Daeng Romo, M Daeng Sibali yang nantinya menjadi komandan LAPRIS tahun 1945 – 1950 , Najamuddin Daeng Malewa, selain dari itu adanya beberapa orang dari daerah Turatea yang terlibat dalam gerakan DI/TII yakni Syamsuddin daeng Ngerang, dan Qaharuddin Muang yang keduanya merupakan tokoh dalam pemberontakan DI/TII.

Terpilihnya daerah Takalar sebagai spesial penelitian dalam penulisan tentang bandit adalah, karena penulis merasa tertarik dengan adanya anggapan dari kalangan masyarakat bahwa daerah Turatea diidentifikasi sebagai daerah perampok (bandit) dan dijadikan sebagai daerah persinggahan atau penampungan barang-barang curian serta dikenal sebagai daerah yang penuh kekerasan sehingga pada tahun 1915 Belanda mengirim pasukan ke Takalar yang didatangkan dari Jawa¹⁰

⁹ Barbara, Op.Cit. hal 193 ; Makkatang Dg Sibali: Wawancara, Makassar, 6 maret 1972.

¹⁰ Barbara Sillar Harvey, lot.cit.

B. Masalah dan Batasan Masalah

Komponen utama dari suatu penelitian adalah adanya masalah yang ingin dijawab atau diselesaikan. Masalah merupakan inspirasi terjadinya suatu penelitian. Menemukan suatu masalah serta memahaminya secara baik merupakan hal yang tidak mudah, dan yang harus dikuasai serta dilatihkan pada para ilmuwan. Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara *das sollen* dan *das sein*, ada perbedaan antara apa seharusnya dan apa yang dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.¹¹

Begitu kompleksnya permasalahan yang muncul dalam studi sejarah sehingga memerlukan telaah sejarah yang lebih kritis agar kompleksitasnya yang dikandung dapat disederhanakan sedemikian rupa sehingga dapat mewakili dari totalitas permasalahan yang ada didalamnya.

Sulawesi Selatan, merupakan daerah basis gerakan DI/TI, yang pada tahun 1950 – 1965 dijadikan sebagai daerah pergolakan di bawah pimpinan Abdul Kahar Muzakkar. Mengakibatkan Sulawesi Selatan hanya dapat menikmati kemerdekaan itu dalam keadaan kacau dan ketidakpastian, teror dan perkosaan.

¹¹ Dr. Arlina. G. Latief, *Komponen Dasar Penelitian*. (Makassar, Diktat, 1990) Hal 39

Sehubungan dengan penulisan mengenai bandit-bandit di daerah Takalar pada tahun 1950-1965, maka pengkajian permasalahannya sangat luas, karena meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Maka penulis akan berusaha batasi permasalahan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan nantinya, sehingga muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sebagai pokok permasalahan, adapun pertanyaan-pertanyaan itu adalah :

- 1) apa yang mendasari munculnya Gerakan Bandit di Daerah Takalar?
- 2) apakah peranan para bangsawan di daerah Takalar dalam pembentukan perbanditan tersebut ?
- 3) apa hubungannya dengan gerakan DI/TII, pimpinan Abdul Kahar Muzakkar ?
- 4) bagaimana pengaruh realitas struktur sosial politik terhadap terbentuknya gerakan bandit di Daerah Takalar.

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya menjadi perhatian utama sekaligus jawaban atas persoalan-persoalan dasar dalam mendapatkan gambaran yang terurut sebagai suatu kesatuan Gerakan Bandit Di Daerah Takalar.

C. Metodologi

Pada prinsipnya, mengungkapkan kejadian sejarah secara objektif tidaklah mungkin. Seorang penulis merupakan subyek yang dipengaruhi oleh pikiran dan jiwa zamannya. Hal yang menjadi tuntutan disiplin ilmu sejarah adalah mendekati keobyektifan agar karya sejarah dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Secara umum, gerakan bandit (perbanditan) merupakan proses sosial¹² yang sangat kompleks. Pendekatannya dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang karena gerakan bandit merupakan fenomena kemasyarakatan yang bersifat umum. Untuk itu dalam penulisan ini memakai alur pendekatan sosial politik.

Dalam mengungkapkan kesejarahan suatu daerah Berbagai usaha yang dilakukan membuat tulisan sejarah yang bersifat lokal ternyata menjadi perhatian berbagai pihak sepanjang sejarah¹³. Namun perlu disadari bahwa penulisan sejarah merupakan hasil rekontruksi imajinatif terhadap masa lampau yang diperoleh melalui proses intelektual berdasarkan metode.

¹² Santono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam metodologi sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hal. 261

¹³ I Gde Widja, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*, (Bandung, : Angkasa, 988), hal. 17

Sedangkan metode sejarah merupakan proses untuk menguji secara kritis rekaman-rekaman masa lampau¹⁴.

Dalam menghadapi gejala historis yang kompleks, setiap rekonstruksi memerlukan adanya pendekatan yang memungkinkan penyaringan data yang diperlukan. Suatu penulisan akan dipermudah dengan adanya konsep yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penulisan. Selain itu penggunaan teori sangat dibutuhkan untuk mengarahkan penulis dalam melakukan kajiannya, sehingga karya sejarah itu nantinya menjadi karya sejarah yang deskriptif analitis yang kesemuanya harus dijelaskan secara kronologis dan sistematis yang nantinya berupa karya ilmiah sejarah, bersifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam upaya penulisan karya ini, penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi penyusunan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha menemukan dan mengumpulkan berbagai tulisan baik berupa buku-buku, karangan-karangan ringkas yang diterbitkan dalam majalah, surat kabar, dan yang tidak diterbitkan berupa makalah maupun sumber yang berupa bahan arsip.

Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa gerakan perbanditan di daerah Takalar belum pernah diteliti secara khusus dan

¹⁴ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*, (terjemahan). Nugroho Natosusanto, UI Press, Jakarta,

diungkapkan secara ilmiah. Dalam skripsi Marwani Muchtar yang berjudul *Banditisme Dalam Perjuangan I Tolo Dg Magassing, dan sejarah Gowa yang* dikarang oleh Abdul Razak Daeng Patunru, serta tesis dari Edwar L Poelinggomang yang berjudul "Perubahan politik dan Hubungan dengan Kekusaan : Makassar 1906-1942. dapat diperoleh gambaran mengenai gerakan tersebut.

Untuk melengkapi data-data tersebut, maka dilakukan juga studi bahan arsip pada Badan Arsip Dan Kepustakaan Nasional Cabang Makassar menunjukkan bahwa arsip-arsip yang berhubungan dengan gerakan ini masih kurang, di samping itu pula bahan arsip umumnya merupakan laporan dari gerakan-gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar sehingga tidak bisa dielakkan dari subyektivitas. Selain dari itu untuk melengkapi data-data yang ada maka diadakan metode wawancara yang hasilnya dijadikan sebagai bahan bandingan dengan data-data yang didapat dari arsip.

D. Tinjauan Pustaka

Secara hukum, bandit adalah siapa saja yang termasuk kedalam kelompok orang yang menyerang dan merampok dengan kekerasan, dari mereka yang menjambret uang gaji di pojok jalan perkotaan sampai kepada

para gerilyawan dan pemberontakan yang terorganisir, yang kebetulan ilegal.¹⁵ Kebanditan cenderung menjadi Epidemi pada saat terjadinya kemiskinan dan krisis ekonomi, dan didukung oleh factor kondisi alam.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebanditan adalah pertama adalah kurangnya lapangan pekerjaan mengakibatkan banyaknya pengangguran, kedua adalah orang-orang yang dimarginalkan oleh masyarakat, dan ketiga adalah perampok terhormat. Untuk dapat mengerti lebih jauh dan mengenal tentang bandit, Erick Hansbawn mengklarifikasikan tiga bentuk bandit sosial yakni : perampok terhormat; kelompok-kelompok gerilya, pejuang primitif (kaum haiduk); pembalas dendam yang membawa terror.

Gerakan perbanditan tidak selamanya jahat seperti halnya apa yang ditulis Marwani Muchtar dalam skripsinya, dijelaskan gerakan perbanditan yang terjadi pada tahun 1915, dimana gerakan merupakan gejala dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat pribumi. Ini berawal dari pernyataan pendek yang merupakan penandatanganan penyerahan kekuasaan, yang menyebabkan kekuasaan para bangsawan makin dipersempit bahkan sampai-sampai tidak diakui keberadaannya.

¹⁵ Erick Honsbawn. *Lot*. Cit hal 1



Gerakan perampokan yang dilakukan oleh I Tolo bukanlah suatu gerakan untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya melainkan gerakan untuk perlawanan. Jadi gerakan perampokan yang di pimpin oleh I Tolo Dg Magassing merupakan suatu gerakan bandit sosial.

Pengertian bandit dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam mengambil barang berupa harta benda tanpa sepengetahuan yang punya atau dengan paksaan, sedangkan perbanditan adalah suatu gerakan apakah dikoordinir atau tidak yang tujuan untuk mengambil harta benda orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dari beberapa konsep pemikiran tentang bandit maupun perbanditan maka, kami dapat memberikan pengertian tentang gerakan bandit yang terjadi pada tahun 1950 –1965 berdasarkan dengan hasil penelitian di arsip dan penelitian perpustakaan. Bahwa gerakan bandit pada tahun 1950 – 1965 di daerah kabupaten Takalar adalah bukanlah suatu gerakan sosial karena gerakannya di tujukan kepada masyarakat apakah mereka dari kaum pribumi sendiri dan gerakannya cukup meresahkan masyarakat. Dan tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok seperti apa yang dilakukan oleh para gerilyawan maupun anggota DI/TII. Jadi jelaslah gerakannya tidak didukung oleh masyarakat tidak seperti dengan gerakan

yang dilaukan oleh I Tolo Dg Magassing bersama anggotanya yang mengadakan gerakan perbanditan untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1915.

Gerakan perbanditan yang terjadi pada tahun 1950 – 1965 lebih cenderung mengarah ketindakan kriminal murni karena tindakannya merupakan suatu pemaksaan dengan menggunakan senjata berupa senjata tajam maupun senjata api (bedil), yang bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat bahkan tidak segan-segan untuk membunuh. seperti yang terjadi di desa Djonggoa Cikoang, bahwa perampokan ini menggunakan senjata api dengan cara mengancam. Mereka mengambil harta benda seorang warga berupa pakaian, uang dan ternak¹⁶ dan pada tanggal 10 februari 1953 penyerangan kepada Gallarang Lengkese yang berjumlah sebanyak 10 orang atau lebih yang menggunakan senjata api serta mengambil harta bendanya berupa uang dan pakaian. Akibat dari gerakan ini Gallarrang Lenggkese meninggalkan rumahnya menuju Pattallassang untuk mencari perlindungan¹⁷.Gerakan perampokan dilakukan oleh orang atau kelompok yang menjadikan sebagai mata pencaharian akibat krisis yang terjadi pada tahun 1950 – 1965.

¹⁶ Badan Arsip dan Kepustakaan Makassar, Inventaris Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi Selatan, No. Reg . 114

¹⁷ Badan Arsip dan Kepustakaan Makassar, Inventaris Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi Selatan, No. Reg. 115

BAB II

PROFIL WILAYAH TAKALAR

A. Geographi Dan Demographi

Kabupaten Takalar adalah salah satu wilayah dari 24 kabupaten yang ada sekarang di propinsi Sulawesi Selatan. Peta geographis Takalar menunjukkan daerah ini berada pada posisi pantai barat Propinsi Sulawesi Selatan, tepatnya 40 Km ke arah selatan dari makassar. Daerah ini berada pada posisi garis Lintang antara $512' 14$ sampai $544^{\circ} / 30''$ Lintang Selatan dan Garis Bujur antara $119^{\circ} / 30^{\circ}$ – $119 40^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah $566,51 \text{ KM}^2$ dengan rincian sebagai berikut :

- a). luas areal hutan sekitar 8.254,00 Ha atau 14,57 % dari luas wilayahnya.
- b). luas areal persawahan sekitar 16.436,22 Ha atau 29,01 % dari luas wilayahnya.
- c). luas areal perkebunan Tebuh PTPN XXXII sekitar 7.110,50Ha atau 12,55 % dari luas wilayahnya.
- d). tambak seluas 4.660,50 Ha atau 6,43 % dari laus wilayahnya.

- e). tegalan seluas 3.639 Ha atau 6,43 % dari luas wilayahnya.
- f). kebun campuran 8.394,50 atau 14 % dari luasnya.
- g). pekarang 1.802,72 Ha atau 3,18 % dari luas wilayahnya.
- h). Lain-lain 6.532,68 Ha atau 11,21 % dari luasnya.¹

Kabupaten Takalar yang berada sekitar 40 Km sebelah Selatan Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- . sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Gowa dan kotamadya Makassar,
- . sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Jeneponto dan kabupaten Gowa,
- . sebelah Selatan dengan laut Flores,
- . sebelah Barat dengan selat Makassar.

Daerah ini termasuk daerah yang beriklim tropis dan mengenal dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan berlangsung pada bulan Noveber, Desember, Januari, Februari, Maret dan April. Curah hujan tinggi pada bulan Maret dan April dan musim kemarau terjadi bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dan tingkat kekeringan terjadi

¹ Taufik. Dkk, Takalar Kini dan Esok Paradigma Baru Bapak Zainal Abidin, (Makassar : Pustaka Refleksi Cipta 2001), hal.3

pada bulan September. Waktu musim hujan kadang lebih lama dibandingkan dengan musim kemarau mengakibatkan kehidupan pertanian bertambah pesat. Hal ini dimungkinkan oleh faktor fisik alamnya yang menyediakan banyak daratan rendah yang subur yang dialiri oleh sungai yang cukup banyak. Maka aliran sungai itu, beberapa diantaranya telah dimanfaatkan untuk sarana irigasi dengan membendung. Empat diantaranya sudah dibendung menjadi pengairan masing-masing bendungan Pammukulu yang merupakan aliran sungai pammukkulu yang terdapat di desa Kommara, Jennetaliasa merupakan aliran sungai Lantang yang terdapat di desa Lantang, Jennemarrung merupakan aliran sungai Jennemarrung yang terdapat di desa Cakura dan desa Bulukunyi, dan bendungan Campagaya yang merupakan aliran sungai Patani dan terdapat di desa Bonto Ramba.²

Di samping tanah datar, ke arah pedalaman akan dijumpai daerah yang berbukit-bukit dan bergunung. Daerah pegunungan itu dikenal dengan nama pegunungan Lompabattang dengan ketinggian 2871 meter dan pegunungan Bawakaraeng dengan ketinggian 3042 meter, juga dijumpai beberapa puncak pada daerah pegunungan Lompobattang yang cukup tinggi seperti ; Gunung Porong, Gunung Moncongloe dan lainnya. Daerah pegunungan itu adalah daerah hutan dan belantara yang mempunyai arti

² Ibid. hal. 8

dan manfaat tersendiri bagi penduduk. Di samping sebagai pencegah erosi juga dijadikan tempat mencari kayu bakar.

Selain kegunaan itu daerah pegunungan yang mempunyai hutan yang lebat sering digunakan sebagai tempat persembunyian para bandit. Cukup mendukung gerakan perbanditan, seperti gerakan yang di pimpin oleh I Tolo Dg Magassing dapat berlangsung lama, berdasarkan laporan Gubernur Quarles de Quarles telah menggunakan daerah hutan di sekitar gunung Lompobattang yang terletak pada perbatasan Afdeelig Makassar dan Afdeeling Bantaeng sebagai tempat persembunyian, perlindungan dan kegiatan lainnya.³ Daerah yang berbukit-bukit dan daerah yang bergunung-gunung cukup menguntungkan dalam gerakan perbanditan ini.

Penduduk yang mendiami daerah ini umumnya suku makassar, pada tahap perkembangannya jumlah penduduk di kabupaten Takalar mengalami penanbahan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk dari tahun 1997 – 2002. sebab tahun yang dijadikan batasan penulis yakni tahun 1950 – 1965 belum lengkap data-datanya, sehingga penulis menganggap data penduduk tahun 1997 – 2002 bisa dijadikan sebagai perbandingan.

Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 1997 – 2002

³ Edwar L. Poelinggomang, . 1982. *Gerakan Banditisme Di Sulawesi Selatan 1915*, (Laiden : Makalah), hal. 3.

Kabupaten Takalar

No.	Tahun	Jumlah Penduduk.
1.	1997	218 598 Orang
2.	1998	221 969 Orang
3.	1999	225 391 Orang
4.	2000	228 867 Orang
5.	2001	232 396 Orang

laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1997 – 2001 sudah bertambah sekitar 13.798 dengan rata-rata pertumbuhan 1,54 % per tahun. (Data Statistik Kabupaten Takalar 2001).

Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Takalar mengalami perkembangan rata-rata 1,54 % per tahun bisa dijadikan pembandingan dari tahun 1950 – 1965 bahwa perkembangan penduduk dari tahun ke tahun mengalami penambahan jumlah.

Umumnya penduduk bergiat dalam bidang pertanian sebagai mata pencaharian pokok. Di samping bekerja sebagai petani penduduk yang berdomisili di daerah pesisir bergiat juga sebagai nelayan sedangkan penduduk yang bermukim di kota kabupaten bergiat sebagai pegawai (pegawai pemerintahan maupun pegawai swasta).

Sementara di sektor pendidikan semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Seperti lazimnya, pendidikan sesungguhnya merupakan barometer kualitas sumber daya manusia. Di sektor ini, pendidikan tidak cuma diarahkan untuk menciptakan manusia-manusia pintar, tapi tak kalah pentingnya adalah peningkatan ketaqwaan dan rasa tanggungjawab.

Fasilitas pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai sekolah lanjutan tingkat atas, baik negaeri maupun swasta bertebaran hampir diseluruh wilayah kabupaten Takalar. Sekolah dasar misalnya sudah berdiri sebanyak 241 buah diasuh sebanyak 1.958 guru, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 36 buah dengan jumlah tenaga pengajar 593 orang, sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sekitar 10 buah dan diasuh sekitar 288 orang tenaga pengajar.

B . Kehidupan Sosial Budaya dan Politik

Kondisi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya kabupaten Takalar pada tahun 1950 – 1965 dengan sekarang hampir mempunyai kesamaan, terutama dalam kehidupan sosial budaya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan karaeng di dampingi oleh satu dewan hadat yang disebut Baku Lompoa yang merupakan kerabat dari

karaeng. Dewan itu berperang sebagai penasehat karaeng sekaligus sebagai pembantu karaeng.⁶ Dewan merupakan lembaga yang berwenang mengadakan pemilihan pengganti karaeng apabila karaeng yang terdahulu dipecat atau meninggal.

Di dalam kehidupan masyarakat diterapkan sosial, budaya dan tradisi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi apabila di lihat ciri-ciri yang terkandung di dalamnya tidaklah berbeda sama sekali, bahkan memiliki kesamaan secara umum. Sebab pada kenyataan yang dimiliki oleh semua masyarakat yang tingkat strata sosial apapun adalah siri', karena itu dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan masyarakat Takalar pada khususnya siri' na pacce merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Siri, adalah malu merupakan pendorong untuk membinasakan siapa saja yang menyinggung rasa kehormatan seseorang atau sikap yang dapat mempertahankan martabat dan harga diri untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan Pacce adalah perasaan pedis atau sakit atas tindakan seseorang. Siri sebagai harga diri dan rasa malu ternyata tidak hanya terdapat dalam diri seseorang individu saja atau bersifat perseorangan dan banyak mempengaruhi tindak tanduknya, akan tetapi juga akan menjadi pelapis ikatan atau hubungan antara individu satu dengan yang lainnya,

⁶ Mukhlis. Op.cit, hal 10

sehingga mereka dapat mengatakan adanya siri antara satu siri antara orang yang berhubungan tersebut dan kesatuan semakin mempererat hubungan dalam kelompok-kelompok di Sulawesi Selatan pada umumnya dan kabupaten Takalar pada khususnya serta membangkitkan solidaritas dari kelompok-kelompok kekerabatan .

Selain itu adanya pelapisan sosial dalam masyarakat Makassar, kaum bangsawan dikenal dengan gelar karaeng yang diartikan sebagai raja sedangkan kerabat-kerabatnya atau keturunannya disebut anakaraeng. Dalam penggolongan kebangsawanan dibagi menjadi dua bagian yakni pertama adalah kaum bangsawan yang merupakan keturunan dari To manurungan, sedangkan golongan kedua adalah para karaeng yang tidak ada hubungannya dengan To manurungan melainkan mempunyai benda-benda tertentu yang disebut kalompoang.⁷

Stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi lima golongan yakni golongan pertama adalah lapisan ana' matola atau anak penerus; kedua, anakarung atau anak-anak dari para karaeng; ketiga adalah tau deceng atau orang-orang baik; keempat adalah tau maradeka yakni orang-orang yang merdeka; kelima

⁷ Heddy Shri Ahimsa, *Minawang: Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta : Gadjja Mada University Press 1988) hal 89

adalah terdiri dari para ata' atau budak.⁸ Dan sampai sekarang masih dipertahankan adanya pemisah antara karaeng dan ata. Begitu kondisi masyarakat Takalar dalam menghiasi kehidupan sehari-harinya.

Dengan perasaan seperti inilah sehingga pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar bisa bertahan lama, begitu pula dalam mengadakan suatu gerakan perbanditan kadang mereka menerapkan sistem siri na pacce yang oleh orang makassar diikat dalam suatu ikatan emosional.

Dalam kehidupan beragama masyarakat kabupaten Takalar pada umumnya adalah agama islam, selain dari itu mengenal adat istiadat seperti maudu Lompoa. Ini mencerminkan kehidupan masyarakat Takalar yang tidak pernah melupakan atau mengabaikan budayanya yang telah berlangsung dari tahun-tahun ketahun.

C. Iktisar Kesejarahan Daerah Takalar

Sejarah singkat terbentuknya kabupaten Takalar tidak dapat dipisahkan dari peran pelaku pada masanya, dimana pada saat itu kabupaten Takala masih bergabung dengan kabupaten Je'nepono yang lebih dikenal dengan nama JENTAK (Je'nepono Takalar) yang pusat pemerintahannya

⁸ Ibid. hal. 99



berkedudukan di Je'nepono berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 (L.N. Nomor. 2 /1957).

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Takalar merupakan Onderafdeling dari Afdeling Makassar. Setelah terbentuk Negara Indonesia Timur Onderafdeling Takalar dibentuklah dewan adat Yaiya yang beranggotakan 13 orang yaitu masing-masing dari daerah bekas kerajaan atau kampung Takalar, Polombangkeng, Galesong, Sanrobone, Topejawa, Lakatong, Pappa, Tompotana, Lengkese, Bauluang, Laikang, Kalukuang, dan Satangnga.

Underafdeling ini membawahi beberapa distrik yang dikepalai oleh Kepala Distrik dengan gelar Karaeng atau Lo'mok, ketiga distrik itu adalah distrik Polombangkeng, distrik Galesong, dan distrik Totallasa. Pemerintahan distrik ini berlanjut sampai pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan keluarnya Perpu No. 56 Tahun 1960 dan Nomor 34 Tahun 1952 (L.N.48/1952, L.N. 263) tentang pembentukan daerah swatantra Makassar yang di pecah menjadi empat daerah yakni Gowa, Pangkep, Maros, Je'nepono-Takalar dan untuk daerah Takalar disebut dengan kawedanan Takalar.

Perkembangan selanjutnya setelah dikeluarkan Undang-Undang No 29 Tahun 1959 (L.N. Nomor. 74 Tahun 1959) tentang pembentukan daerah-

daerah tingkat II. Disinilah cikal bakal terpisahnya kabupaten Je'nepono dengan kabupaten Talkalar, dimana kabupaten Takalar berdiri sendir sebagai suatu kabupaten dengan ibukota Pattalassang. Berdasarkan peraturan Daerah Tingkat II Takalar Nomor.13 Tahun 1960 dan pada tahun itu pula dibentuklah pemerintahan kabupaten Takalar dengan Bupati Kepala Daerah Donggeng Dg Ngasa dan Ketua DPR-GR adalah H. Ahmad Dahlan Dg Sibali.

BAB III

GERAKAN BANDIT DI TAKALAR

Gerakan bandit bukan merupakan hal yang baru terjadi di daerah Makassar, khususnya daerah Takalar, permulaan abad XX. Jauh sebelumnya tindakan perbanditan berupa perampokan sudah sering dilakukan, khususnya daerah Polombangkeng yang merupakan bagian daerah Kabupaten Takalar. Tindakan perampokan dipandang sebagai suatu kebiasaan untuk menunjukkan ketangkasan dan keberanian. Mereka adalah orang-orang yang telah jenuh dan bosan dengan keberadaannya, pemimpin-pemimpin lokal yang merasa tidak puas atau ariktokrasi muda yang mencoba ketangkasan dan keberaniaanya¹, yang kadang menjadi bandit profesional.

Masyarakat yang mendiami kepulauan Sulawesi, mengalami penderitaan yang cukup panjang akibat dari penjajahan apalagi ditambah dengan gejolak yang terjadi sesudah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950 - 1965, yang membuat penderitaan masyarakat. Masyarakat mengalami kekurangan makanan karena hasil panen yang tidak begitu baik, di tambah lagi dengan naiknya harga barang-barang, misalnya harga beras

¹ Sutherland H.A. "Political Structure and Colonial Control in South Sulawesi", dalam : *Man, Meaning and History*, R. Sobelfold, J.M. School dan J. Tinnekes, Ed. (The Hague : Martinus Nijhotef, 1980). hal. 230-245.

membubung tinggi dari harga Rp 1.56/liter menjadi Rp 1.75/liter dan jagung dari harga Rp 78/liter menjadi Rp 91/liter dan ini terjadi pada tahun 1953,² sehingga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan adanya perbanditan³, kemudian ditambah lagi dengan keadaan perpolitikan di Indonesia yang tidak menentu seperti tidak bertahannya pemerintahan sampai batas waktunya diganti lagi oleh yang lain, seperti kabinet yang dijalankan Wilopo (april 195 – Juli 1952). Sementara pemimpin bangsa Indonesia pada waktu itu belum berhasil merumuskan model pemerintahan bagaimana yang cocok untuk bangsa yang baru merdeka. Keadaan seperti ini berimbas kepada seluruh daerah pada umumnya khususnya Sulawesi Selatan, sehingga dianggap sebagai awal percobaan demokrasi di Indonesia yang gagal.⁴

Gerakan perbanditan pada awalnya merupakan suatu gerakan penolakan terhadap dominasi kekuasaan Belanda untuk melawan pemerintah Kolonial Belanda. Tindakan perbanditan ini didalangi oleh kelompok bangsawan seperti gerakan I Tolo Daeng Magassing beserta anggotanya. Gerakan ini ditujukan kepada mereka yang mengadakan kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan gerakan ini di dalangi oleh pejabat

² Lembaga Arsip dan Kepustakaan Makassar : Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi, Tahun 1950 – 1960, No Reg. 234. Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar, Januari 1952.

³ Eric Hansbawn, Op.Cit hal.7

pemerintah bumiputera yang bekerja pada pemerintah Hindia Belanda. Itulah sebabnya W.J. Coenen menyatakan bahwa gerakan perampokan merupakan gerakan perampokan yang bersifat politis.⁵

Berbeda halnya dengan gerakan perampokan yang terjadi pada tahun 1950 – 1965, merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, seperti laporan kejahatan yang terjadi di kabupaten Jeneponto dan Takalar pada tahun 1953 – 1959.⁶ Ini disebabkan karena pada masa ini rakyat Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan dalam keadaan yang tidak menentu. Keadaan itu berlangsung sejak awal tahun 1950 sampai dengan tahun 1965. Pada tahun itu Republik Indonesia yang merdeka, berada pada saat-saat pembenahan diri untuk memberikan kepada rakyatnya arti kemerdekaan serta hakekat bangsa yang memiliki kedaulatan.

Daerah Sulawesi yang menjadi salah satu propinsi yang berada di bagian Indonesia Timur, terutama daerah-daerah selatan dan tenggara, hanya dapat menikmati kemerdekaan itu dalam keadaan kacau dan ketidakpastian, teror dan perkosaan. Kedaulatan dalam arti kebuasan mereka yang kuat atas yang lemah, penaklukan hati nurani oleh kekuatan yang perkasa. Seperti dengan adanya gerakan-gerakan pemberontakan seperti

⁴ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1989). hal. 335

⁵ Poelinggomang, " *Gerakan Banditisme di Sulawesi Selatan 1915* " (Laiden : Makalah ,1983) hal. 169.

gerakan Andi Azis, kemudian disusul gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar.⁷

A. Terjadinya Perbanditan

Tindakan perbanditan pada awalnya bukanlah tindakan kriminal, bagi masyarakat melainkan suatu perbuatan untuk melawan ketidak puasan dengan pemeritahan, jadi gerakan perbanditan bukanlah alasan ekonomi dan politik saja, tetapi dengan alasan kultural atau kebiasaan. Khususnya di daerah Turate yang mempunyai kebiasaan apabila seseorang atau sekelompok yang baru masuk kedaerah kekuasaannya, maka penguasa yang berada di daerah itu mencoba kemampuan seseorang atau kelompok tersebut apakah dengan jalan mencuri barang bawaannya atau yang lainnya seperti yang pernah terjadi di daerah Turatea pada masa pemerintahan VOC. Ketika Aru Palakka mendapat kepercayaan dari VOC untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di Bantaeng, ia berangkat dengan sejumlah pengiringnya. Namun ketika ia beristirahat, kuda tunggangannya berhasil dicuri. Hal ini yang menyebabkan Aru Palakka membatalkan perjalanannya

⁶ Lembaga Arsip dan Kepustakaan Makassar : Arsip Pemerintah Sulawesi, Tahun 1950 - 1960
No PEMX 27/2..Tgl 9/Septembere 1953

⁷ Mattulada. "Kahar Muzakkar - Profil Patriot dan Pemberontak" - Majalah : *Prisma*, No. 8
Jakarta : Agustus Tahun 1977.

karena kepercayaannya yang diembankan kepadanya dan kembali ke Makassar, karena ia yakin bahwa yang mencuri kudanya adalah pihak yang bersengketa. Keberhasilan mereka mencuri kuda tunggangan Aru Palakka berarti ia ditolak sebagai perantara dari kedua bela pihak yang bersengketa.⁸ disini dapat kita memberikan gambaran bahwa gerakan bandit yang pada awalnya bukan cuma tindakan kriminal biasa saja, melainkan suatu tindakan untuk menguji seseorang yang akan memasuki daerahnya selain itu pula memperlihatkan kepada orang bahwa daerahnya tidak sembarangan dimasuki oleh orang luar. Apalagi dalam menyelesaikan masalah-masalah didaerah tersebut.

Memang harus diakui bahwa bahwa gerakan perbanditan di tanah Makassar khususnya daerah Kabupaten Takalar, mengalami peningkatan yang cukup tinggi ini diakibatkan oleh kondisi sosial kultural masyarakat. Apalagi pada tahun 1950 – 1965 terjadi gejolak-gejolak seperti pemberontakan Kahar Muzakkar yang berlangsung selama 15 tahun .

Berdasarkan penelitian tentang Gerakan bandit di Takalar yang dilakukan oleh penulis di Arsip, bahwa gerakan perbanditan yang terjadi di daerah Takalar sangat dipengaruhi oleh gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar, selain itu pula dipengaruhi oleh kelompok-kelompok atau gerombolan baik yang dilakukan oleh anggota kelaskaran seperti gerakan I

* Mawarni Muhtar. Op. cit. hal 39.

Ma'ro dan kelompok-kelompok kecil yang mempunyai tujuan untuk kepentingan ekonomi semata. Akan tetapi dalam uraian selanjutnya akan lebih difokuskan hubungan perbanditan yang terjadi di Kabupaten Takalar dengan gerakan DI/TII, sebab setiap gerakan ataupun tindakan yang terjadi pada tahun 1950 – 1965 tidak terlepas dari gerakan DI/TII.

Gerakan perbanditan yang terjadi pada tahun 1950 – 1965, sangat dipengaruhi oleh gerakan DI/TII yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan bahkan berpengaruh sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok Sulawesi dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemberontakan DI/TII dimulai sejak awal tahun 1950 sampai dengan pertengahan tahun 1965, di bawah pimpinan Abdul Kahar Muzakkar seorang komandan pertempuran yang terpercaya kejujuannya dalam siasat perang. Meletusnya pemberontakan ini menyebabkan Sulawesi Selatan berubah menjadi kacau karena mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat, kotanya terpisah-pisah dan daerah pedalaman yang terputus yang hampir semua batas-batasnya dikuasai oleh gerombolan pemberontak. Rakyat dicekam rasa takut oleh kekuatan-kekuatan senjata yang di pinggul baik dari kalangan pasukan pemerintah maupun dari pemberontak yang sewaktu-waktu memuntahkan peluru, ketika mereka bertemu dan sasarannya adalah mereka yang disebut

rakyat yang putus asa mencari perlindungan dengan ketidak pastian perlindungan.

Pemberontakan ini berawal dari ketidakpuasan, disebabkan oleh keinginan mereka untuk bergabung kedalam tubuh TNI/APRIS tidak terpenuhi. Karena di dalam perekrutan atau penerimaan anggota TNI/APRIS, mereka mengeluarkan persyaratan supaya yang dapat bergabung kedalam tubuh TNI/APRIS adalah mereka yang mengikuti seleksi atas dasar perorangan, dan yang memenuhi standar kesehatan, pendidikan, kemampuan membaca/menulis⁹. Kemudian dilihat dari para pejuang hanya memiliki keberanian dan pengalaman berperang tanpa dibekali oleh ilmu pengetahuan. Para gerilya merasa tidak puas dengan keputusan pemerintah sehingga beberapa satuan yang terbesar dan terlengkap persenjataannya – Batalyon X02 dari KGGS, Batalyon Mobil Ratulangi, dan Lipang Bajeng mengundurkan diri ke hutan ketika ia tidak diperkenankan untuk masuk APRIS/TNI¹⁰. Karena tidak puas dengan keputusan itu maka, Kahar Muzakkar yang bertanggungjawab dalam pembentukan resimen Hasanuddin dan ia sendiri komandannya. Permohonan ini ditolak kemudian Kahar memutuskan

⁹ Barbara Op.Cit. hal 172

¹⁰ Ibid, Bardosono, "Peristiwa Sulawesi Selatan", hal 92-93; wawancara. M Dg Sibali, Makassar, 6 Maret 1972. Hutan berarti lebih dari pada daerah pedalaman; istilah itu lebih berarti setiap wilayah pedalaman yang dikuasai oleh kawanan gerilyawan. hal.174

hubungannya dengan TNI dengan menanggalkan tanda kepangkatannya dan melemparkan ke meja di depan Kawilarang.¹¹

Dengan adanya pemberontakan Kahar Muzakkar, kondisi daerah Sulawesi menjadi tidak aman terjadi kerusuhan dimana-mana masyarakat menjadi resah dengan kondisi seperti ini tanpa bisa diselesaikan oleh pemerintah dengan cepat. Masyarakat seperti anak ayam yang mencari induknya untuk mencari perlindungan. Khususnya di daerah Takalar dua pimpinan dari DI/TII yang terkenal yakni Syamsuddi Dg Ngerang dan Qaharuddin Muang, sehingga DI/TII dapat juga berkembang di daerah ini. Akan tetapi gerakan perbanditan di daerah Takalar bukan saja dilakukan oleh anggota DI/TII melainkan dari kelompok lainnya yang belum menyerahkan diri seperti I Ma'ro dan anggtanya . Dengan adanya pemberontakan ini mengakibatkan maraknya perbanditan dan perampokan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota DI/TII maupun gerombolan I Ma'ro dan masyarakat itu sendiri, disebabkan kondisi daerah Takalar pada waktu itu mengalami musim pacceklik yang berkepanjangan dan menjadi epidemi dalam gerakan perbanditan atau perampokan.

Kalau kita melihat tindakan dari perampokan yang terjadi pada tahun 1950-1965, banyak sekali terjadi tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan perampokan yang dilakukan oleh gerombolan/kelaskaran dan anggota DI/TII

¹¹ Ibid, hal. 175



maupun kelompok-kelompok bandit biasa. Seperti gerakan dilakukan oleh anggota dari DI/TII dengan jalan mendatangi rumah penduduk dengan jalan memeras dan meminta sumbangan secara paksa seperti halnya tindakan yang dilakukan oleh anggota DI/TII pada tanggal 12 November 1959, dibawah pimpinan Radjhakuneng dengan beberapa anak buahnya yang bersenjata lengkap memasuki Kampung Parigi, melakukan permintaan sumbangan secara paksa dan perampasan barang-barang rakyat (laporan Kejahatan di Kabupaten Takalar dan Je'nepono)¹² yang bertujuan untuk kepentingan kelompoknya dan pribadinya sehingga masyarakat tidak senang dengan tindakannya sehingga pada waktu itu pemerintah kabupaten Takalar dan Je'nepono membagi tiga jenis kejahatan berdasarkan kenyataan, kegiatan gerombolan dalam onderofdeeling Djeneponto yakni :

- a. Kegiatan-kegiatan gerombolan yang telah dijalankan oleh gerombolan sejak April tahun 1953, misalnya pemungutan pajak sebesar Rp.10,- dari tiap-tiap wajib pajak.
- b. Kegiatan-kegiatan gerombolan yang belum dijalankan, tetapi menjadi rencana dari gerombolan, misalnya penagihan bea potong hewan bagi tiap-tiap kerbau yang disembelih.

¹² Lembaga Arsip dan Kepustakaan Makassar : Arsip Pemerintah Sulawesi tentang kejahatan yang terjadi dikabupaten Je,nepono dan Takalar No. PEMX/14 .15/ tanggal 4 pebruari 1960. No Reg 242.

- c. Kegiatan yang tidak dijalankan dan tidak menjadi rencana dari gerombolan, misalnya pengumpulan beras sebanyak 1 liter bagi tiap-tiap rumah tangga.¹³

Perampokan yang dilakukan oleh beberapa anggota bersenjata di rumah Gallarrang Lengcese, mereka mengambil beberapa barang berharga berupa uang dan pakaian, mengakibatkan Gallarrang Lengcese mengalami kerugian dan mengungsi ke Pattallassang. Di bulan yang sama perampokan juga terjadi di kampung Djonggoa (Laikang), perampok yang beranggotakan antara 5 sampai 8 orang yang mempergunakan senjata api dan senjata tajam mengambil barang-barang berharga berupa uang, pakaian dan beberapa ekor hewan ternak, milik dari seorang warga keturunan Cina yang bernama Hong Ji (seorang pedagang). Kejadian seperti ini berlangsung tiap malam bahkan kadang-kadang melakukan perampokan pada siang hari¹⁴.

Selain dari gerakan DI/TII, ada beberapa kelompok perampok yang terkenal khususnya di daerah Takalar yakni gerombolan I Ma'ro yang bermarkas di desa Sawakong Towa dan berada dibawah distrik Galesong. Mereka mengadakan perampokan untuk kepentingan anggotanya. Mereka merupakan gerombolan pejuang yang tidak diterimah masuk kedalam tubuh TNI/APRIS, maka merteka membentuk suatu kelompok untuk mengacau

¹³ Lembaga Arsip dan Kepustakaan Makassar : Arsip Pemertintah Sulawesi Selatan tentang kejahatan yang terjadi di kabupaten Je'nepono No. 1239

¹⁴ Lembaga Arsip dan Kepustakaan Makassar: Arsip Pemerintah Sulawesi Selatan Tentang Kejahatan yang terjadi di Kewedanan Takalar, No. Reg 124.

sekaligus merampok yang bertujuan untuk menakut-nakuti dan membuat keonaran.

Dalam melakukan perampokan mereka tidak segan-segan untuk melukai dan membunuh korbannya seperti yang terjadi pada sebuah kampung Moncongkomba pada suatu malam tahun 1950 didatangi rumahnya oleh sekelompok orang yang bersenjata. Mereka ingin mencuri harta benda I Maddolongan akan tetapi I Maddolongan melakukan perlawanan hingga akhirnya ia meninggal di tangan gérombolan tersebut.¹⁵ Ditambah lagi dengan kondisi daerah ini yang telah dijelaskan pada bab terdahulu sangat memungkinkan bagi perampok untuk menghilangkan jejak. Itulah sebabnya para perampok ini jarang diketahui dan susah untuk di tangkap.

B. Pengorganisasian Gerakan.

Tindakan-tindakan perampokan atau perbanditan di daerah Takalar bukanlah hal yang baru melainkan tindakan yang sudah sejak lama serta untuk memperlihatkan dirinya sebagai orang hebat, sehingga daerah ini di juluki sebagai daerah penampungan barang-barang hasil curian. Sesudah kemerdekaan jumlah perampokan semakin meningkat, oleh karena terjadinya

¹⁵ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di Kampung Moncongkomba H.R DG. Siriwa Mantan Kepala Desa Moncongkomba yang menjabat selama 5 periode dari tahun 1963 - 2001)

kelaparan akibat kegagalan panen atas dasar itu dihubungkan dengan cara pemenuhan kebutuhan.

Dalam melakukan aksinya, perampok ini mempunyai cara yang tersusun rapi, sehingga dalam pelaksanaannya berhasil dengan baik. Adapun pengorganisasian gerakannya adalah dibagi dalam beberapa tahap, yakni kelompok yang memata-matai, kelompok yang melaksanakan gerakan, dan kelompok yang melakukan penjualan atau pemasaran hasil curian.

Kelompok yang memata-matai biasanya adalah orang yang berada dan menetap setiap kampung yang terdiri dari satu sampai dua orang, bertujuan untuk memperhatikan dan mengintai orang-orang kaya yang terdapat di kampung itu. Khususnya orang yang akan dirampok, mereka memperhatikan kapan orang tersebut bepergian atau kapan orang itu lengah sehingga lebih mempermudah dalam melakukan aksinya.

Setelah itu ada anggota yang lainnya yang bertugas untuk melaksanakan perampokan biasanya berjumlah banyak, dan kadang dalam pelaksanaannya mereka bertindak kejam. Untuk memasarkan hasil curian tersebut, mereka menjualnya di luar daerah dimana di daerah tersebut ada yang bertindak memasarkan hasil curian tersebut.

Mengenai pembagian hasil curian sepenuhnya diatur oleh pimpinan dari perampok, misalnya pemimpinnya mendapat 50%, sedangkan yang 50%

dibagi rata kepada semua anggotanya mulai dari yang memata-matai, yang melakukan gerakan sampai kepada yang melakukan penjualan. Ini dilakukan bagi kelompok perampok yang menjadikan sebagai profesi.

Berbeda halnya dengan gerakan yang dipimpin oleh I Ma'ro setelah berhasil merampok mereka mengadakan pesta bersama persoalan pembagian itu tidak ada dalam tujuan gerakannya, sedangkan pemungutan atau derma paksa yang dilakukan oleh anggota DI/TII untuk kepentingan kelompoknya, tetapi ada sebagian dari mereka yang mempergunakan nama DI/TII untuk merampok atau melakukan praktek derma paksa.¹⁶

C. Keresahan Yang Di Timbulkan

Gerakan perbanditan di Kabupaten Takalar sangatlah meresahkan masyarakat, perasaan takut selalu berkecamuk dalam diri masyarakat. Keresahan ini berawal dari gerakan-gerakan para perampok yang terjadi dimana-mana yang tidak mengenal waktu, perampok tersebut tidak memandang apakah mereka itu adalah seorang Gallarrang atau rakyat biasa. Dalam melakukan aksinya para perampok ini susah sekali untuk ditangkap dan selalu berhasil mengambil barang masyarakat.

¹⁶ Lembaga Arsip dan Kepustakaan Makassar : Arsip Pemerintah Sulawesi tentang Kejahatan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto dan Takalar No. PEMX/14. 15/ tanggal 4 Februari 1960 No. Reg 243.

Bandit-bandit ini membuat pemerintah Kabupaten Takalar yang merupakan gabungan dengan Kabupaten Je'nepono, pemerintah sulit untuk mengkoordinir daerahnya disebabkan jarak antara kedua daerah ini cukup jauh. Para perampok ini mempunyai pengalaman yang cukup luar biasa, karena mereka susah ditangkap dan selalu berhasil meloloskan diri dari kejaran para warga. Bahkan ada diantara warga masyarakat yang baru tahu bahwa hewan peliharaannya sudah tidak ada pada saat bangun tidur atau setelah sampai pada tempat penyimpanannya, di samping rasa tidak aman akan jiwanya lebih-lebih harta bendanya yang merupakan sasaran utama dari perampok tersebut.

Selain hal tersebut di atas aksi teror yang terjadi dimana-mana apalagi menjelang pra dan pasca pemilu tahun 1955, beberapa kelompok orang yang tidak dikenal melarang masyarakat untuk ikut pemilu dan adapula yang diculik diperjalanan selain dari itu para kelompok tersebut mencuri kotak suara, alat peraga, dan berkas-berkas pemilu yang dilakukan di rumah salah seorang ketua anggota Partai Persatuan Pembangunan di Garassikang bagian dari Distrik Bangkala.¹⁷

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka pemerintah khususnya Kabupaten Takalar mengaktifkan patroli pada malam hari dan, dan

¹⁷ Lembaga Arsip dan Kepustakaan Makassar : Arsip Pemerintah Sulawesi, tentang Laporan keadaan Perpolitikan. No 3674/3.- tahun 1955.



menharapkan kepada masyarakat untuk membantu kelompok-kelompok untuk jaga malam supaya bisa menjegah gerakan bandit tersebut.

D. Penumpasan Gerakan

Gerakan perbanditan ini sangat merugikan masyarakat, untuk itu perlu ditumpas. Dalam mengadakan penumpasan gerakan perampokan itu maka pemerintah Sulawesi memberikan wewenang kepada tiap daerah pemerintahan untuk melakukan usaha penumpasan sendiri, seperti yang terjadi di kawedanan Takalar pada tanggal 13 Juni 1953 Mallarangan Dg. Ngirate didampingi oleh karaeng Galesong memasuki sarang gerombolan yang selama ini mengadakan perampokan dan pencurian di kawedanan Takalar yang berpusat di kampung Sawakong Towa yang menjadi sarang atau markas gerombolan I Ma,ro dan kawan-kawan.¹⁸ Untuk bisa melumpuhkan gerakan I Ma'ro tersebut maka pemerintah khususnya Distrik Galesong mengepung markas tersebut dengan bantuan dari masyarakat yang tidak senang dengan gerakan Ima'ro tersebut sampai akhirnya mereka berhasil ditangkap walaupun masih ada yang bisa meloloskan diri, sedangkan I Ma'ro ditahan dalam pengamanan polisi dan di penjarakan di Takalar.

¹⁸ Lembaga Arsip dan Kepustakaan Makassar : Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. No PEMX III/ 27/2.. Tgl 9 September 1953. tentang kejahatan di Kawedana Takalar.

Dengan gerakan tersebut berhasil melumpuhkan dan berhasil menangkap beberapa anggota dari komplotan tersebut. Selain dari itu setiap kampung atau gallarrang mengadakan jaga malam untuk mengantisipasi gerakan perampokan tersebut, dan itulah yang dilakukan sampai sekarang. Mengenai penumpasan gerakan perbanditan di Takalar, pada tahun 1950 – 1965 tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk hidup tenang, namun walau begitu perampokan tidak bisa di tumpas sampai ke akar-akarnya.

Penumpasan gerakan perampoakan ini tidak terlepas juga dengan penumpasan gerakan-gerakan pemberontakan seperti penumpasan gerakan pemberontakan Kahar Muzakkar, sebab banyak gerakan-gerakan perampokan atau pencurian yang dilakukan oleh anggota-anggota DI/TII yang mengingkari dari tujuannya semula, apalagi gerombolan yang dipimpin oleh Syamsuddin Dg Ngerang dan Qaharuddin Muang yang merupakan tokoh DI/TII yang menguasai daerah Turatea (Takalar dan Jeneponto) yang mengadakan keonaran di daerah ini.¹⁹

¹⁹ Badan Arsip dan Kepustakaan : Inventaris Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi Selatan tentang situasi perpolitikan di Indonesia NO. Reg 122

BAB IV

PENGARUH PERBANDITAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. Daerah Takalar Setelah Penumpasan Perbanditan

Polombangkeng punya konotasi yang seram karena berarti "tidak punya kaki" namun demikian Polombangkeng sudah dua kali mengalami peristiwa penting, pertama tahun 1946, yaitu diadakannya penyatuan organisasi laskar dalam bentuk gabungan Laskar Pemberontak Indonesia Sulawesi (LAPRIS). Wadah ini dipercayakan kepada tokoh bangsawan Polombangkeng yang bernama Ranggong Daeng Romo dengan sekjen Wolter Mongosidi yang berhasil melancarkan perlawanan yang gigih kepada Belanda yang mengakibatkan munculnya gerakan teror dan penganiyayaan oleh Westerling. Kedua, terjadi pada tanggal 5-7 Februari 1950 dengan konperensi yang disebut Rapat Raksasa yang dihadiri oleh puluhan ribu orang dan menghasilkan beberapa kesepakatan atau disebut Statment 7 Februari 1950 yaitu

1. kami bekas pemberontak dan bekas tahanan politik yang dahulu dikatakan perampok pengacau pembunuh, dsb dan kini digelar pahlawan dan prajurit-prajurit perjuangan,
2. yakin bahwa tidak ada buah seorang pun buat kami menjadi nama atau gelar sebagai soal utama,
3. bahwa yang kami ketahui adalah bahwa kami cinta ibu pertiwi dan dengan sadar, pada waktu yang sudah, kami melakukan siasat

destruktif, keluar menerjang segala perkosaan atas proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai suatu ledakan keinginan dan hasrat bangsa Indonesia yang sudah berabad-abad hidup di jajah, ingin hidup bernegara sendiri dan dapat menyumbangkan kebangsaannya untuk ikut serta dalam pembinaan pri kemanusiaan dan keadilan diantara bangsa-bangsa di atas dunia,

4. bahwa sesungguhnya lahirnya RIS dan NIT itu karena Belanda semata-mata dan pula didorong oleh cara bapak-bapak kita yang tidak mengikuti jiwa dan cara pemuda lekas-lekas ber-Malino dan ber-Denpasar, sehingga lahirlah NIT dan RIS sebenarnya tidak sedikit pun tidak mengganggu hasrat dan keinginan seluruh bangsa Indonesia yang pada prinsipnya tetap berpegang pada proklamasi 17 Agustus 1945, baikpun yang telah ber-Malino dan ber-Denpasar, ataupun yang telah berpenjara atau berhutan;
5. bahwa masih banyak pula rakyat di NIT yang tidak atau belum mendapat kesempatan mengembangkan keinginan itu; bahwa dalam banyak hal kita di NIT banyak ketinggalan.

Berpendapat :

Bahwa untuk mengembalikan RIS sekarang menjadi Republik Indonesia sesuai dengan hasrat rakyat, maka perlu seluruh tenaga warga negara dikerahkan dalam segala lapangan dan tetap berpegang teguh pada Pancasila;

Sadar bahwa : untuk melancarkan pembangunan, bahaya-bahaya : 1) kehilangan kewaspadaan, 2) percakaran antara kita sama kita, 3) perangkat oportunisme, harus dapat diatasi bersama, maka dengan ini membentuk organisasi dengan nama, : Biro Perjuangan Pengikut Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, mempunyai tugas bekerja secara efektif dan dengan penuh

tanggung jawab kepada seluruh bangsa Indonesia dengan program perjuangan tertentu.¹

Perbanditan di daerah Takalar bukanlah tanpa sebab tapi muncul dengan suatu proses yang panjang sehingga penumpasannya memerlukan waktu dan proses yang panjang pula. Penumpasan perbanditan di daerah Takalar merupakan suatu usaha untuk mencari ketenangan dan kedamaian hidup walaupun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Karena dalam pelaksanaannya tidak terkoordinasi secara menyeluruh dan terpadu dari tingkat kawedanan Takalar sampai tingkat kampung sebagai basis perbanditan atau perampokan. Sehingga apa yang muncul dikemudian hari adalah gejala yang tidak bisa diabaikan dari proses itu, apalagi penumpasan yang dilakukan biasanya hanya ditujukan kepada para pembesar atau dalang gerakan perampokan atau perbanditan padahal dalang ini hanya bertindak sebagai otak, sementara yang melakukan aksi perbanditan adalah pengikut yang setia dan terkadang punya profesi sebagai pencuri. Dengan kata lain bahwa tanpa dipimpin, mereka bisa melakukan aksi tergantung apa yang memotifasi gerakan itu.

¹ Edwar L. Poelinggomang, dalam Makalah "Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", pada Seminar dan Temu Toko Sejarah di Jaranitra, Makassar 27 Juni 2002, hal 8-9. lihat juga otobiographi Yusuf Bauty, *Genderang Kemerdekaan Dari Penjara Ogepad*, (Yogyakarta: Benteng Suharna, 1983) hal 143-145.

I Ma'ro yang merupakan toko perampok yang terkenal di masyarakat Takalar di tangkap pada tahun 1963 dan dipenjarakan sampai masa tuanya di Kabupaten Takalar serta ditangkapnya Syamsuddin Daeng Ngerang dan Qaharuddin Muang oleh TNI pada tahun 1964, maka gerakannya bisa di patahkan oleh TNI.

Walaupun cukup disadari bahwa tertangkapnya I Ma'ro memperlihatkan suatu keadaan yang kondusif, lebih-lebih ketika Syamsuddin Daeng Ngerang dan Qaharuddin Muang berhasil diamankan. Boleh dikatakan gerakan keonaran di daerah Takalar berhasil dilumpuhkan, tapi tidak berarti bahwa kegiatan perbanditan sudah lenyap di daerah Takalar karena faktor pendukungnya bukan hanya faktor ekonomi, kondisi alam tetapi lebih kepada faktor hura-hura yaitu ingin menguji ketangkasan mereka atau memamerkan kekuatan dan kekuasaan mereka. Begitulah wajah gerakan perbanditan saat itu.

Mengenai kelompok-kelompok gerakan bandit yang ada di kabupaten Takalar kita tidak bisa memperkirakan, karena pada waktu itu tidak jelas berapa yang jumlahnya. Gerakan ini bermacam-macam ada yang berkelompok, adapula yang dilakukan hanya satu orang saja, akan tetapi gerakan I Ma'ro dan DI/TII bisa dijadikan sebagai contoh dan mewakili kelompok-kelompok lain yang ada di kabupaten Takalar.

Pengaruh perbanditan terhadap kehidupan masyarakat Takalar sangat kompleks dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka dengan demikian kita harus mampu mengungkapkan pengaruh tersebut dalam berbagai bidang khususnya bidang politik, kondisi ekonomi, dan kehidupan sosial budaya.

a. Situasi Politik

Dengan adanya gerakan perbanditan atau perampokan di Sulawesi Selatan khususnya daerah Takalar dan Jeneponto yang merupakan daerah gabungan mengakibatkan suasana perpolitikan tidak aman, selain itu pula adanya keinginan dari gerombolan yang ingin menggagalkan pemilu tahun 1955. Seperti yang terjadi pada ketua anggota salah satu partai politik di Garassikang daerah Bangkala dicuri berkas-berkasnya berupa kartu anggota bahkan ada pemilih yang diculik oleh para gerilyawan supaya tidak pergi untuk memilih.² Adapun tujuan dari gerakan gerombolan ini dalam merampok adalah ingin memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa pemerintah tidak bisa melindungi dan mengamankan jalannya pemilu, aksi tersebut sebagai indikasi atau gejala perbanditan yang mempengaruhi situasi politik.

² Badan Arsip dan Kepustakaan: inventaris Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi Selatan ,tentang Situasi Perpolitikan di Indonesia . No Reg. 132



D. Keadaan Ekonomi

Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa yang menjadi epidemi terjadinya perbanditan adalah krisis ekonomi, begituan yang terjadi di daerah Sulawesi khususnya daerah Takalar mengalami paceklik yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kekurangan makanan. Harga beras pada saat itu membubung tinggi hingga dari harga Rp 1.56/liter menjadi Rp 1.75/liter dan jagung dari harga Rp 78/liter menjadi Rp 91/liter.³ Kondisi perekonomian pada saat itu mengalami keterpurukan ini juga disebabkan oleh system pemerintahan yang tidak beres disamping itu juga adanya gerakan pemberontakan Kahar Muzakkar yang telah memporak-porandakan system perekonomian di Sulawesi, karena masyarakat merasa tidak tenang untuk bertani karena hasilnya selalu dirampok atau diambil paksa baik yang dilakukan anggota gerombolan ketika memasuki daerah maupun perpok biasa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dengan keadaan yang tidak menentu ini, susah untuk mengembalikan harga-harga bahan pokok terutama makanan karena kondisi daerah yang tidak aman, dan susah untuk mengembalikan kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat karena gangguan keamanan yang terjadi dimana-mana sehingga kadang pemerintah tidak bisa untuk menfokuskan pada penumpasan gerakan perampokan (perbanditan) saja, melainkan banyak hal

³ Badan Arsip dan Kepustakaan Makassar. Arsip Pemerintah Propensi Sulawesi. Tahun 1950 - 1960. No. Reg 234, Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar, Januari 1952

yang perlu dibenahi dalam pemerintahan. Namun setelah penumpasan mulai terasa adanya hasrat para petani untuk turun sawah lagi walaupun masih dalam keragu-raguan tapi cukup memberi pengaruh psikologi masyarakat.

c. Sosial Budaya

Dengan adanya gerakan bandit ini masyarakat menjadi resah, oleh karena dengan adanya perbaditan ini membuat masyarakat tambah giat untuk menjaga harta bendanya dengan cara mengadakan ronda setiap malam dengan jalan bergilir yang dikoordinir oleh kepala kampung atau gallarrang. Sisi inilah yang dianggap sebagai pengaruh positif karena tumbuhnya semangat kedisiplinan di kalangan masyarakat untuk bisa menjaga harta maupun keluarganya dari bahaya yang mengancam.

Keadaan seperti itu berdampak psikologis dan memunculkan keraguan dan kecuriaan diantaranya mereka bahkan mengurangi tindakan para pebanditan walaupun tidak punya kekuatan untuk membuktikan dan menyelesaikan masalah tersebut.

B. Reaksi Dan Aktivitas Masyarakat

a. Mencari Bentuk dan Identitas Diri

Setelah beberapa lamanya perbanditan membuat kehidupan masyarakat menjadi resah, namun akhirnya setelah banyaknya gerombolan yang telah di tumpas seperti gerakan I Ma'ro dan pemberontakan Kahar Muzakkar dapat ditumpas. Diantara beberapa anggota dari kelompok tersebut berusaha untu mengubah kehidupannya yang lebih baik dan bisa diterima di lingkungan masyarakat.

Di Takalar juga ada reaksi dan aktifitas sebagai akibat dari suatu peristiwa. Akibatnya adalah penyesuaian diri sesuai dengan kedekatan emosional dan kedekatan kemampuan (baca profesi), seperti ada para anggota dari kelompok bandit yang memfokuskan diri untuk bertani sawah ladang, ada yang kelaut baik sebagai pedagang maupun pencari ikan, termasuk yang punya keterampilan, juga berbuat serupa antara lain membuat tembikar, anyam-anyaman, membuat tungku dan periuk dari tanah liat, buru-buru dan lain-lain. Tidak ketinggalan bagi mereka yang punya profesi sebagai bandit atau anggota perbanditan juga melakukan pembenahan diri,yang nantinya ada yang terbentuk karena dorongan ekonomi maupun karena terlanjur dimarjinalkan oleh masyarakat.

b. Dampak yang Di Timbulkannya

Masalah yang muncul kemudian ketika penumpasan perbanditan. Perbanditan tidak mampu ditumpas sampai akar-akarnya karena dilakukan dengan setengah hati. Penumpasannya hanya ditujukan kepada tokohnya sementara pebanditan bukan hanya atas kehendak tokoh/pemimpin tetapi gerakan bandit bisa dilakukan dengan perorangan karena dimotifasi faktor ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan harga bahan pokok membubung tinggi, meningkatnya pengangguran dalam berbagai tingkatan, gagalnya panen, dan maraknya perjudian di berbagai tempat.

Gejala-gejala seperti itu belum mampu ditangani secara tuntas sehingga hal ini memberi semangat munculnya kembali perbanditan sosial dikalangan masyarakat yang punya latar belakang sebagai seorang bandit. Seperti itulah yang terjadi di daerah Takalar, dan perkembangan ini diperkuat oleh situasi zaman secara nasional karena dimana-mana terjadi gejolak. Jadi bukan merupakan suatu keganjilan jika terjadi perampokan, perampasan, keonaran di sana-sini dan bukan hanya dilakukan satu orang atau satu kelompok tetapi bermacam-macam orang dan bermacam-macam kelompok yang sering mengatas namakan laskar atau gerakan DI/TII.

Adalah sulit memang dibuktikan karena masyarakat juga tidak ada tuntutan yang begitu serius untuk diusut, yang ada bahwa semua orang laki-laki dewasa dalam keadaan tegang karena ada saling curiga mencurigai.

Tidak sedikit diantara mereka yang sengaja secara sukarela menyatakan ikut bergabung dengan salah satu kelompok perbanditan karena merasa dirinya lebih aman daripada tinggal di rumah sendiri tanpa kawan. Saling curiga berkembang menjadi saling mematai karena masyarakat dipaksa menjadi mata-mata dan dengan segera pergi melapor kalau ada orang yang masuk kampung dan mencurigakan. Akibatnya kembali ke masyarakat jika ada sesuatu yang terjadi tanpa dilaporkan sebelumnya. Begitulah sampai kelompok perbanditan merajalela kemana-mana apalagi pemimpin mereka kebanyakan golongan sosial menengah ke atas yang punya basis kekuatan ekonomi dan mempunyai banyak massa. Sebaliknya anggota kebanyakan dari golongan sosial menengah ke bawah yang berbasis rakyat biasa dan punya loyalitas kepada pemimpin karena ketergantungan ekonomi mereka. Sampai setelah penumpasan perbanditan gejala-gejala seperti yang masih tetap bermunculan walau intensitasnya sudah banyak berkurang terutama menjelang akhir tahun 1965, dimana masyarakat dalam suasana kefakuman dan mereka sangat khawatir kalau dituduh sebagai anggota PKI kemudian langsung ditembak mati.

C. Menata Kehidupan Masyarakat Takalar

a. Menata Sistem Politik dan Pemerintahan

Takalar sebagai bagian integral dari bangsa yang baru merdeka ikut merasakan imbas dari peristiwa yang cukup penting tersebut, karena Takalar dijadikan basis operasional gerakan DI/TII di bawah koordinasi Syamsuddin Daeng Ngerang dan Qaeruddin Muang. Tentu bermuara pada penataan sistem politik dan pemerintahan yang harus disesuaikan sebagai wujud dari tanggapan politik pemerintah daerah. Penataan sistem politik di Takalar saat itu, merupakan reaksi dari banyaknya gerakan perbanditan dengan tujuan untuk mempersempit ruang gerak kelompok perbanditan dengan cara meninjau kembali undang-undang darurat nomor 2 tahun 1957 yang masih menyatukan Takalar dan Je'nepono sampai dikeluarkannya Undang-Undang nomor 29 tahun 1959, tentang pembentukan daerah tingkat II yang sebelumnya dikeluarkan UU No 31 tahun 1952 tentang pembentukan daerah swatantra Makassar dan Je'nepono-Takalar masuk di dalamnya. Kemudian dipertegas dengan peraturan daerah tingkat II Takalar No 13 tahun 1960 yang ditandai sebagai lahirnya kabupaten Takalar dengan Bupati Donggeng Daeng Ngasa dan ketua DPRGR adalah H.Ahmad Dahlan Daeng Sibali.⁴

⁴ Makalah yang dibacakan pada Hari Jadi Kabupaten Takalar yang ke - 40 "Perjalanan Pemerintahan Kabupaten Takalar" pada tahun 2000.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membentuk kabupaten Takalar adalah untuk mempermudah koordinasi administrasi antara pusat dan daerah, di samping untuk mempersempit ruang gerak para pebandit secara tidak langsung, sehingga kelompok bandit mampu dideteksi walaupun tidak mudah. Untuk ditindak dan diberi hukuman, karena pemimpin mereka terkadang dekat dengan penguasa setempat. Jadi penataan sistem politik dan pemerintahan pada dasarnya difokuskan pada usaha mencari kekuatan dan simpatisan demi tercapainya keamanan dan kedamaian karena setiap masyarakat menginginkan adanya kedamaian.

Mengembangkan Pertanian dan Infrastruktur

Pertanian sebagai basis perekonomian daerah Takalar menjadi penting untuk dibicarakan, sebab perbanditan di Takalar juga dipengaruhi kondisi alam yang berhutan-hutan dan persawahan yang terbengkalai karena banyak lahan pertanian tidak terjamah oleh tangan-tangan yang terampil sehingga menjadi kewajaran kalau kegagalan panen sering terjadi sebagai akibat dari suatu proses yang salah, akhirnya hama penyakit melengkapi kegagalan pertanian.

Tercatat pula antara tahun 1950 – 1965 fluktuasi harga beras sangat mencolok, ini dapat dilihat pada bagian sebelumnya bahwa kenaikan beras dari Rp 1.56/liter menjadi Rp 1.75/liter dan harga jagung dari Rp 78/liter menjadi 91/liter yang menyebabkan rakyat kecil khususnya para petani yang tidak punya apa-apa semakin terpuruk di dalam kesengsaraan, penderitaan, kelaparan dan kematian⁵. Sehingga pelariannya agar mampu bertahan hidup melakukan kejahatan dengan cara mencuri atau merampok, juga bisa dilakukan dengan cara mengabdikan diri dari salah seorang karaeng atau tuan tanah yang punya kekuatan ekonomi, terjadilah hubungan patron klien yang dibangun dengan kesadaran masing-masing untuk saling menguntungkan. Dimana para tuan tanah mendapat keuntungan karena pengabdian yang dilakukan para pekerja untuk bekerja dalam berbagai lapangan pekerjaan⁶. Pada sisi lain karaeng atau tuan tanah juga mendapat keuntungan karena mendapatkan gaji atau makanan bersama keluarganya dari para pekerja sawah tersebut, dan bukan hanya itu tetapi klien juga selalu mendapat pengayoman dan perlindungan dari karaeng atau tuan tanah termasuk bisa meminjam dan pertolongan lainnya. Hubungannya betul-betul

⁵ Lembaga Arsip dan Kepustakaan Makassar, Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi, Tahun 1950 – 1960. No. Reg 234, Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar, Januari 1952.

⁶ Heddy Shri Ahimsa, *Minawang: Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Gadjadara University Press 1988) hal. 91



simbiotik karena saling menguntungkan antara para pekerja sawah dengan para karaeng atau tuan tanah tersebut.⁷

Pengembangan pertanian di daerah Takalar belum sangat terasa pada masyarakat karena pemerintah belum memberikan kebijakan, penanganan, perhatian yang serius dan terfokus walaupun cukup disadari pertanian di daerah Takalar lumayan subur pada daerah-daerah tertentu, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Pada hal lahan pertanian ini cukup mendukung yang dialiri oleh sungai yang cukup banyak tetapi airnya terbuang percuma.

Baru mendapat perhatian pada akhir tahun 1965 sampai memasuki pemerintahan orde baru karena adanya pengairan air walaupun kurang efektif tetapi sedikit banyaknya sudah berpengaruh positif terhadap para petani lebih-lebih adanya pembangunan bendungan seperti bendungan Pammukulu dari aliran sungai Pammukulu yang dibangun sekitar tahun 1978 an dan mengairi sebagian besar lahan pertanian yang ada di desa Kommara, bendungan Je'netallasa yang dibangun tahun 1984 dari aliran sungai Lantang yang mengalir pertanian desa Lantang dan sekitarnya, bendungan Jennemarrung yang dibangun 1992 dari aliran sungai jennemarrung untuk mengairi pertanian desa Cakura dan desa Bulukunyi, dan bendungan

⁷ Ibid. hal 93

Campagaya dari aliran sungai Patani' di bangun sekitar tahun 2000 dan belum selesai sampai sekarang untuk mengairi pertanian di desa Bontoramba. diantara bendungan ini yang besar adalah bendungan Pammukilu sedangkan yang lainnya merupakan bendungan pembantu yang dibuat oleh masyarakat untuk menampung air pada saat musim kemarau.

Manfaat dari itu semua khususnya yang berkaitan dengan perbanditan sangat terasa dimata masyarakat karena mampu mengalihkan perhatian dan aktivitas masyarakat untuk turun sawah dan mampu meminimalisasi gerakan perbanditan bahkan mampu disadarkan secara sosial kultural. Akan tetapi sekali lagi bahwa itu tidak mampu melenyapkan perbanditan secara totalitas sebab sudah terkontaminasi dengan sosial kultural pula. Namun ini bisa dipertanyakan dan dikomfirmasikan pada masa kini, sedikit lepas dari skop temporal tulisan ini "lalu apa bedanya dengan para koruptor sekarang?". ini memerlukan pengkajian tersendiri. Sementara pengembangan pertanian tidak jauh berbeda dengan pengembangan infrastruktur yaitu banyaknya dibangun sarana dan prasarana seperti jalan-jalan, jembatan, institusi pendidikan, lembaga keagamaan (pesantren, mesjid) dan pasar-pasar.

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan terdahulu dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya gerakan bandit di Takalar 1950 – 1965 adalah : adalah kegagalan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menata pemerintahan pusat sampai ketingkat daerah, ini disebabkan karena seringnya pergantian pemerintahan, mengakibatkan terjadinya gejolak dimana-mana; faktor kedua adalah kehidupan sosial, budaya masyarakat Turatea khususnya daerah Takalar seperti dibahas pada bab sebelumnya untuk kaum laki-laki untuk memperlihatkan kemampuan dan ketangkasannya; faktor ketiga adalah kondisi ekonomi pada tahun 1950 – 1965, terjadinya krisis di mana-mana dan ini merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya perampokan; faktor keempat adalah keresahan sosial yang ditandai dengan meluasnya perasaan yang tidak pasti, tidak mnentu, tidak aman dan yang sejenisnya, keadaan ini berkaitan dengan adanya gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII, maupun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para gerilyawan yang merupakan para pejuang yang masuk ke hutan karena tidak puas dengan perekrutan ke dalam tubuh TNI (ABRI).

Mengingat orang-orang yang mengadakan perampokan atau pencurian adalah orang-orang pemberani yang mempunyai pengalaman dalam bidang militer dan mempunyai senjata api sehingga memudahkan dalam gerakannya kemudian ditunjang pula oleh kondisi alam di daerah itu yang berhutan-hutan dan bergunung-gunung sehingga dengan kelompok kecil akan memudahkan pelaku gerakan dapat segera melarikan diri dan bersembunyi di hutan-hutan, bukit dan gunung.

Disamping itu pula untuk mengalihkan perhatian pemerintah pada kegiatan perampokan dan keonaran semakin bertambah banyak, meskipun berbagai tindakan yang telah ditempuh pemerintah belum juga berhasil menangkap, menawan, atau membinasakan tokoh yang menjadi dalang gerakan perampokan itu, ini dapat dilihat dari laporan kejahatan Kabupaten Je'nepono dan Takalar pada tahun 1950 - 1959. Nanti sejak berhasilnya gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar dapat dihentikan, maka berkurang pulalah perampokan. Namun di masyarakat Sulawesi Selatan khususnya daerah Turatea (Takalar) tidak bisa terlepas dari gerakan perampokan dan pencurian, ini dimungkinkan oleh faktor kondisi alam yang tidak subur disamping itu juga faktor budaya.



Selain dari itu dengan adanya gerakan perbanditan tersebut setidaknya tidaknya ada beberapa dampak positif yang bisa diambil seperti diadakannya ronda malam atau dengan kata lain hidup berdisiplin.

Dengan di tumpasnya gerakan pemberontakan Kahar Muzakkar pada tahun 1965 serta gerombolan I Ma'ro setidaknya gerakan perbanditan dapat dikurangi. Membuat para bandit tersebut berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dan bisa diterima di masyarakat, terbukti dengan proses pencarian jati diri dengan jalan membuka lahan pertanian dan bersawah.

Walaupun gerombolan perbanditan dapat ditumpas, akan tetapi benih-benih perbanditan yang ada dalam tubuh manusia tidak dapat dipisahkan. perbanditan merupakan hukum alam, tetapi janganlah kita menganggap bahwa mereka seperti itu selamanya atau menjadi bandit. Sebenarnya mereka ingin berbuat baik namun karena faktor keadaan yang membuat mereka bertindak seperti itu.

B. Saran – Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan penulis lakukan, maka ada beberapa hal pokok pikiran yang ingin disampaikan berhubungan dengan penulisan sejarah Indonesia pada umumnya dan sejarah Sulawesi Selatan pada khususnya.

1. penelitian dan penulisan sejarah Sulawesi Selatan masih sangat kuran, khususnya menyangkut gerakan sosial, karena itu masih sangat terbuka kesempatan bagi rekan-rekan untuk menulis dan mengadakan penelitian, namun mengingat data yang terpecah-pecah dan dalam arti kurang lengkap sehingga kepada yang berminat diharapkan lebih giat membenahi diri dengan metode dan tehnik ilmiah sebaik mungkin sebelumnya agar tidak banyak menghadapi kesulitan dalam mensintesis data dan keterangan yang diperoleh.
2. disamping itu pula kiranya perlu diketahui bahwa gerakan sosial di Sulawesi Selatan pada era tahun 1950 – 1965 sangatlah tidak terlepas dengan gerakan-gerakan yang terjadi pada tahun tersebut, seperti gerakan pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Kahar Muzakkar.
3. penelitian dan penulisan sejarah yang memilih obyek gerakan sosial cukup menarik dan bermanfaat, bukan saja dapat mengungkapkan dinamika kehidupan masyarakat, melainkan juga dapat menyajikan suatu penjelasan tentang sebab dan kondisi yang memungkinkan suatu tindakan perampokan atau perbanditan. Dengan demikian dapat diambil pelajaran untuk membenahi masyarakat agar tidak melakukan gerakan perampokan atau perbanditan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.



4. penulis perlu juga menyatakan bahwa karya ini belum dapat mencapai maksud dan tujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan pokok permasalahan dengan utuh dan lengkap, keterbatasan itu terletak pada pada peralatan akademik yang dimiliki dan penguasaan bahasa sumber yang kurang, karena itu tidak tertutup kekurangan dalam karya ini. Sehubungan dengan hal itu diharapkan kiranya bagi mereka yang membaca karya ini dapat mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dapat menyampaikan kepada penulis. Berbagai kritik dan saran perbaikan penulisan ini dapat diterima dengan senang hati dan mendapat perhatian.

Akhirnya penulis harapkan kiranya karya ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi kita semua dalam hal sejarah Sulawesi Selatan pada umumnya dan khususnya menyangkut karya sejarah yang memiliki obyek gerakan sosia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

Badan Arsip Dan Kepustakaan Daerah Sulawesi Selatan :

- Inventaris Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi Selatan, No. Reg 114
- Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi Tahun 1950 – 1960, tentang Laporan akhir Pemerintah kota Makassar. Januari 1952, No reg 234.
- Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi, tentang Kejahatan yang terjadi di Kabupaten Je'nepono dan Takalar, No. REMX/15.14/ Tgl 4 Pebruari 1960. No Reg 242.
- Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi, tentang keadaan Politik tahun 1953, No. 3674/3
- Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, tentang Kejahatan di Kewedanan Takalar, No REMX/III/27/2;. Tanggal 9 September 1953.
- Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi, tentang Kejahatan yang terjadi di Kabupaten Je'nepono. No 1239.

Buku Dan Makalah :

- Abduh Muh, dkk., *Sejarah Perlawanan Terhadap Imprealisme Dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan*. Jakarta : Dep Dik Bud. 1985.
- Abduh, Muh dan Sarita Pawyloy. *Sejarah Revolusi (1945 – 1949)*. Ujung Pandang : Dep Dik Bud ...1980.
- Abduh, Taufik (ed). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta, Gadjadja Mada University Press. 1985.
- Daljoeni, N. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Social*. Bandung : Alians 1985.
- Dijk, Carnolis Van. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta. Grafity Press. 1983.
- Gonggong, Anhar. Abdul Qohar Muzakkar: *Dari Patriot Hingga Pemberontakan*. Jakarta : Gramedia Widiaksarana. 1992.
- Gotschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. (Nugroho Notosusanto). Jakarta : Bina Aksara. 1986.
- Harvei, Barbara Sillars. *Pemberontakan Qohar Muzakkar : Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta : Grafity Press. 1986.
- Henddy Shri Ahimsa, Minawang : *Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta : Gadjadja Mada University Press, 1988.

- Honsbown. E.J., *Bandit – Bandit Sosial*. Jakarta Teplos Press. Cet I. Oktober 2002.
- Hugiono, P.K Poerwanta, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : PT. Panelan Cipta 1992.
- Kadir, Harun dkk., *Sejarah Daerah Sulawesi Selat*. Jakarta: Dep Dik Bud. 1997.
- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu – Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Garamedia. 1991.
- Latif, Arlina. G., *Komponen dasar Penelitian*, Diktat. Makassar 1990.
- Limbugau, Daud, "Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19 – 20". Dalam Buku : Muklis Paeni, *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai*. Ujung Pandang: P3MP Lemhans. 1989.
- Mattulada, Prof.Dr., Kahar Muzakkar : *Profil Patriot dan Pemberontak*. Jakarta : *Majalah Prisma*. 1987.
- Muchtar, Mawarni, *Banditisme Dalam Perjuangan : (Gerakan I Tolo Daeng Magassing)*, (Skripsi S.1 ada fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang. 1990)
- Paeni, Mukhlis, *Landasan Kultural dalam Pranata Bugis Makassar*. Muklis Ed. Jakarta : Grafity. 1996.

- Paeni, Muhklis dan Edwar. Batara Gowa : *Gerakan Messianisme di Tanah Makassar*, Laporan Penelitian. Ujung Pandang: Unhas. 1995.
- Poelinggomang, Edwar L, *Gerakan Banditisme di Sulawesi Selatan 1915*. Makalah, Laiden. 1983.
- Robinson, Richard, *Indonesia The Rise Of Capital, Australian: asian Studies Association Of Australia*. 1986.
- Singarimbung, Masri dan Sofyan efendi, *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. 1995.
- Sutherland, H.A. "Political Structure And Colonial Control In South Sulawesi". Dalam : *Man, Meaning, and history*. Subelfold, J.M School dan J. Tinache. Ed The Hague : Martinus Nijholef, 1980.
- Taufik. Dkk., *Takalar Kini Dan Esok : Paradigma Baru Bupati Zainal Abidin* . Makassar: Pustaka Refleksi. 2001.
- Widja, I Gede, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Bandung : Angkasa 1988.